

RANCANG BANGUN SINERGI KEBIJAKAN AGROPOLITAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MENUNJANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH

Design of Policy Synergy of Agropolitan and Local Economic Development to Accelerate Regional Development

Muhammad Iqbal dan Iwan Setiajie Anugrah

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani No. 70, Bogor 16161*

ABSTRACT

High economic development growth orientation triggers urban bias and creates discrimination over rural region and agricultural sector affects on unbalanced transfer of resources from rural region to urban area. Consequently, it generates some problems such as disparity income between rural and urban communities and huge migration of people from rural region to urban area as well as rural exploitation causing ecosystem degradation and rural poverty. Policy synergy of agropolitan and local economic development through institutional engineering, specifically through the establishment of economic cluster and partnership forum can be viewed as a solution to the aforementioned problems. Ideally, it is implemented through road map strategy covers socialization, consolidation, and pilot project (initial phase) activities in line with local government autonomy framework.

Key words : *agropolitan, local economic development, synergy, policy, economic cluster, partnership forum, regional development*

ABSTRAK

Orientasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memicu pembangunan yang bias perkotaan dan diskriminasi terhadap wilayah perdesaan dan sektor pertanian, sehingga menyebabkan ketimpangan transfer sumberdaya dari desa ke kota. Kondisi ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan seperti kesenjangan pendapatan antara masyarakat perdesaan dengan komunitas perkotaan, migrasi penduduk secara berlebihan dari wilayah perdesaan ke kawasan perkotaan, dan eksploitasi wilayah perdesaan yang cenderung kurang mengindahkan aspek lingkungan sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem dan kemiskinan masyarakat perdesaan. Sinergi kebijakan agropolitan dan pengembangan ekonomi lokal melalui rekayasa kelembagaan klaster ekonomi dan forum kemitraan dapat dianggap sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Idealnya sinergi kebijakan tersebut diimplementasikan mengacu pada langkah strategi seperti sosialisasi, konsolidasi, dan uji coba (fase awal) kegiatan dalam kerangka otonomi daerah.

Kata kunci : *agropolitan, pengembangan ekonomi lokal, sinergi, kebijakan, klaster ekonomi, forum kemitraan, pembangunan wilayah*

PENDAHULUAN

Orientasi pembangunan yang lebih mengutamakan percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sedikit banyaknya dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah yang cenderung bias perkotaan (*urban bias*) serta diskriminasi terhadap wilayah perdesaan dan sektor pertanian. Efek penetasan (*trickle down effect*) yang semula diharapkan terjadi, malah sebagian menimbulkan terjadinya transfer sumberdaya secara tidak seimbang dari wilayah perdesaan ke kawasan perkotaan. Hal tersebut dapat menimbulkan kesenjangan pendapatan antara masyarakat desa dengan masyarakat kota, migrasi penduduk secara berlebihan dari wilayah desa ke kawasan kota, dan eksploitasi kawasan perdesaan yang cenderung mengabaikan aspek lingkungan, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem dan memicu kemiskinan masyarakat perdesaan. Lambat laun situasi dan kondisi ini dikhawatirkan berdampak negatif terhadap kinerja sektor pertanian.

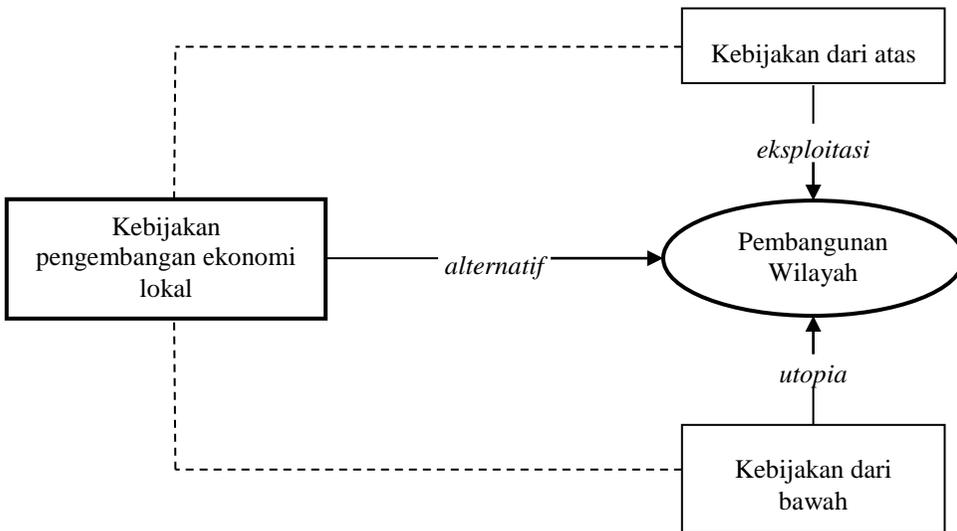
Di kawasan perkotaan muncul berbagai permasalahan akibat tingginya angka urbanisasi dan ketidakmampuan kota dalam menyerap kelebihan tenaga kerja yang datang dari desa. Pemasalahan-permasalahan tersebut antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah pekerja sektor informal perkotaan, bertambahnya area pemukiman kumuh, pencemaran lingkungan (tanah, air, dan udara), kemacetan lalu lintas, dan permasalahan sosial lainnya. Seiring dengan itu, produktivitas penduduk dan kualitas hidup masyarakat di kawasan perkotaan juga menurun dengan konsekuensi meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.

Sinergi agropolitan dan pengembangan ekonomi lokal dapat dianggap sebagai kebijakan strategis dalam mengatasi permasalahan di atas. Tulisan ini bertujuan membahas rancang bangun sinergi kebijakan agropolitan dan pengembangan ekonomi lokal menunjang percepatan pembangunan wilayah. Pokok bahasan diawali dengan kerangka analisis kebijakan terkait dengan konsep pembangunan wilayah, diikuti dengan bahasan mengenai kebijakan agropolitan, kebijakan pengembangan ekonomi lokal, sinergi kebijakan agropolitan dan pengembangan ekonomi lokal, dan penutup berupa kesimpulan dan implikasi kebijakan.

KERANGKA ANALISIS KEBIJAKAN

Dalam konteks pembangunan wilayah terdapat beberapa kebijakan pengembangan yang terus berevolusi seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau dinamika permasalahan yang dihadapi. Secara garis besar, kebijakan tersebut dapat diklasifikasikan atas tiga kelompok, yaitu : (1) kebijakan pengembangan dari atas (Hansen, 1981); (2) kebijakan pengembangan dari bawah (Stohr, 1981); dan (3) kebijakan pengembangan ekonomi lokal (Blakely, 1991).

Pada dasarnya kebijakan-kebijakan di atas saling melengkapi dan menyempurnakan menurut situasi, kondisi, dan permasalahan yang terjadi (Gambar 1). Sesuai dengan tahap keberadaannya, kebijakan yang muncul belakangan merupakan reaksi dan kritik atas kebijakan sebelumnya. Kebijakan pengembangan dari atas memiliki kelemahan karena dapat menimbulkan kesenjangan pada wilayah-wilayah yang lebih kecil akibat eksploitasi sumberdaya oleh wilayah yang lebih besar. Sementara itu, kebijakan pengembangan dari bawah sebetulnya memiliki muatan yang cukup bagus namun seringkali lemah dalam implementasi, sehingga kebijakan ini cenderung bersifat mengawang-awang (*utopia*). Akhirnya, kebijakan pengembangan ekonomi lokal (Blakely, 1994) dapat dianggap sebagai alternatif dalam mencari solusi permasalahan yang terjadi pada kebijakan pengembangan dari atas dan kebijakan pengembangan dari bawah.



Gambar 1. Kebijakan Pembangunan Wilayah

Friedman dan Weaver (1999) mengemukakan bahwa agropolitan termasuk salah satu kebijakan pengembangan dari bawah, namun implementasinya dapat berjalan baik apabila memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain : (1) kecukupan dana penunjang; (2) kekuatan komitmen koordinasi; dan (3) tidak tergantung sepenuhnya pada keputusan dari pusat (sentralistik). Oleh karena itu, kebijakan agropolitan seyogianya disinergikan dengan kebijakan pengembangan ekonomi lokal.

KEBIJAKAN AGROPOLITAN

Konsep Agropolitan

Agropolitan berasal dari kata 'agro' (pertanian) dan 'politan' (kota) yang dapat diartikan sebagai kota pertanian atau kota di wilayah pertanian atau pertanian di kawasan kota (Friedman dan Douglas, 1975). Lengkapnya, agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang seiring berjalannya sistem dan usaha agribisnis yang mampu melayani, mendorong, menarik, dan menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) wilayah sekitarnya (Suwandi, 2005).

Nasution (1998) mendeskripsikan karakteristik agropolitan atas lima kriteria. Kelima kriteria tersebut adalah :

1. Agropolitan meliputi kota-kota berukuran kecil sampai sedang (berpenduduk paling banyak 600 ribu jiwa dengan luas wilayah maksimum 30 ribu hektar).
2. Agropolitan memiliki wilayah belakang/perdesaan (*hinterland*) penghasil komoditas utama atau unggulan dan beberapa komoditas penunjang sesuai kebutuhan yang selanjutnya dikembangkan berdasarkan konsep perwilayahan komoditas.
3. Agropolitan mempunyai wilayah inti/perkotaan (*central land*) tempat dibanggunya agroindustri (terdiri dari beberapa perusahaan) pengolahan komoditas yang dihasilkan wilayah perdesaan yang pengembangannya disesuaikan dengan kondisi alamiah produksi komoditas utama (unggulan).
4. Agropolitan memiliki pusat pertumbuhan yang harus dapat memperoleh manfaat ekonomi internal bagi perusahaan serta sekaligus memberikan manfaat eksternal bagi pengembangan agroindustri secara keseluruhan.
5. Agropolitan mendorong wilayah perdesaan untuk membentuk satuan-satuan usaha secara optimal melalui kebijakan sistem insentif ekonomi yang rasional.

Tujuan pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dengan kota (Deptan, 2002). Wujudnya yaitu dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan), dan terdesentralisasi (wewenang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat).

Pada wilayah agropolitan, masyarakat diharapkan berperan aktif, sementara fungsi pemerintah adalah sebagai penyedia fasilitas (fasilitator) dengan fokus pemberdayaan (Deptan, 2003). Pemberdayaan yang dimaksud mengandung empat prinsip, yaitu :

1. **Prinsip kerakyatan** – pembangunan diutamakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat banyak (bukan kesejahteraan individu atau kelompok) berdasarkan keadilan.

2. **Prinsip swadaya** – bimbingan dan dukungan kemudahan (fasilitas) yang diberikan harus mampu menumbuhkan sikap keswadayaan dan kemandirian (bukan menciptakan ketergantungan).
3. **Prinsip kemitraan** – para pelaku agribisnis diperlakukan sebagai mitra kerja pembangunan yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat menjadikan mereka sebagai pelaku dan mitra kerja yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
4. **Prinsip bertahap dan berkelanjutan** – pembangunan dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat setempat serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, idealnya agropolitan dapat digambarkan sebagai kawasan yang memiliki karakteristik khusus (Deptan, 2002). Karakteristik khusus tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Sebagian besar kegiatan di kawasan agropolitan adalah pertanian (agribisnis) yang sekaligus menjadi sumber pendapatan masyarakat, termasuk di dalamnya usaha agroindustri, perdagangan, dan jasa pelayanan.
2. Hubungan antara kota (*central land*) dan daerah-daerah sekitarnya (*hinterland*) pada kawasan agropolitan bersifat interdependensi, dimana kawasan pertanian mengembangkan usaha budidaya (*on-farm*) dan produk skala rumah tangga (*off-farm*) sedangkan kota menyediakan fasilitas seperti sarana, modal, teknologi, informasi, penampungan, pengolahan, dan pemasaran.
3. Kehidupan masyarakat di kawasan agropolitan mirip dengan suasana kota, karena kondisi prasarana dan sarannya relatif tidak jauh berbeda dengan prasarana dan sarana yang ada di kota.

Basis Agropolitan

Basis agropolitan adalah pembangunan wilayah terpadu. Rusastra *et al.* (2002) mengemukakan bahwa pembangunan wilayah terpadu tersebut paling tidak harus merefleksikan interaksi antara tiga aktivitas ekonomi yang secara spasial mengarah pada optimalisasi pemanfaatan sumberdaya di kawasan inti (kota) dan wilayah belakangnya (desa). Ketiga aktivitas ekonomi tersebut adalah : (1) sinergisme hubungan desa-kota harus didukung oleh sistem kelembagaan yang dapat menunjang redistribusi sumberdaya dan komoditas berdasarkan prinsip ekonomi; (2) akumulasi modal perlu dilaksanakan melalui mekanisme pasar atau ekstra pasar dengan tujuan realokasi modal dalam rangka optimalisasi manfaat sosial; dan (3) mengingat kemunduran (*diminishing return*) pusat pertumbuhan (kota) yang pada suatu saat akan menjadi kenyataan, maka perlu diantisipasi melalui mekanisme ekstra pasar.

Tiebout (1957), Isard (1966), dan Nuses (1968) sebagaimana dikutip oleh Rusastra *et al.* (2002) mengemukakan bahwa paling tidak diperlukan tiga syarat

dalam optimalisasi implementasi program agropolitan. Ketiga syarat tersebut adalah :

1. Harus diusahakan adanya otonomi lokal dan kewenangan untuk pengelolaan sumberdaya alam agar pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan;
2. Bagian yang lebih besar dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan agropolitan harus diinvestasikan dalam rangka meningkatkan daya hasil dan mendorong pertumbuhan ekonomi berikutnya; dan
3. Batas minimum dan maksimum untuk luas tanah milik harus ditentukan, agar sumberdaya alam dapat dikelola secara produktif dan rasional.

Implementasi Agropolitan

Tiga tolak ukur (indikator) utama sebagai representasi keberhasilan target atau sasaran implementasi program agropolitan adalah pembangunan prasarana dan sarana, sistem dan usaha agribisnis, dan pengembangan sumberdaya manusia. Hasil penelitian Rusastra *et al.* (2004) menunjukkan bahwa kinerja pencapaian sasaran implementasi program agropolitan di tiga kabupaten, yakni Cianjur (Jawa Barat), Agam (Sumatera Barat), dan Barru (Sulawesi Selatan) adalah sebagai berikut : (1) pengembangan prasarana dan sarana fisik dinilai berhasil dengan baik, sedangkan kelembagaan agribisnis dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) masih memerlukan pemantapan; (2) pengembangan agribisnis yang mencakup sistem usaha, kelembagaan ekonomi, dan kemitraan belum berjalan seperti yang diharapkan; dan (3) fasilitasi pemerintah dalam pengembangan sumberdaya manusia belum memberikan dampak dan manfaat optimal ditinjau dari sisi partisipasi masyarakat, perluasan kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat peserta program dengan kinerja yang variatif.

Secara umum, saat ini gaung agropolitan hampir boleh dikatakan tidak kedengaran lagi. Eksistensi prasarana dan sarana yang telah dibangun sebelumnya seolah-olah hanya dimanfaatkan selama program berlangsung. Dengan kata lain, optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana tersebut seakan terhenti (*stagnant*) setelah program usai. Kondisi ini patut disayangkan mengingat investasi yang ditanamkan merupakan aset bernilai tinggi yang seyogianya dimanfaatkan secara optimal dan lumintu (*continue*) guna menunjang pembangunan pertanian khususnya di kawasan program agropolitan.

Agar representasi keberhasilan target atau sasaran di atas dan upaya pemantapan, pemenuhan harapan, dan optimalisasi pencapaian dampak serta manfaatnya, maka program agropolitan seyogianya disinergikan dengan konsep pengembangan ekonomi lokal. Implementasinya, eksistensi aset program agropolitan harus dimanfaatkan secara optimal guna menunjang konsep pengembangan ekonomi lokal. Uraian berikut membahas tentang konsep pengembangan ekonomi lokal berikut sinergi implementasinya dengan program agropolitan menuju percepatan pembangunan wilayah.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

Pengembangan ekonomi lokal (PEL) merupakan proses jalinan kepentingan antara pemerintah, swasta, produsen, dan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam lokal (*endogenous development*) dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja (Blakely, 1991). Dalam PEL terkandung beberapa misi kegiatan seperti pengembangan usaha dan ekonomi daerah, wahana partisipasi masyarakat, pemberdayaan produsen atau masyarakat, pengentasan kemiskinan, transparansi, akuntabilitas, dan kerjasama regional yang bersifat lintas sektoral (Alizar *et al.*, 2002).

Alizar *et al.* (2002) menekankan bahwa dalam implementasinya, PEL perlu diwujudkan dalam kemitraan, atau disebut dengan istilah KPEL (Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal). Kemitraan menjadi penting dan mendasar dalam rangka memanfaatkan potensi sumberdaya suatu daerah, mengingat pemerintah sendiri memiliki keterbatasan (terutama dana) sehingga memerlukan kontribusi sektor swasta dan masyarakat dalam pembangunan. Sekaligus, kemitraan dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengurangi dominasi sektor tertentu dalam proses perencanaan kebijakan terpadu.

Dalam upaya meningkatkan akselerasinya, KPEL dilandasi oleh dua strategi. *Pertama*, strategi “klaster ekonomi” untuk meningkatkan kesempatan memperoleh pendapatan (*livelihood*). Kondisi ini dapat dicapai melalui identifikasi peluang dan pengembangan pasar, diversifikasi, dan pemasaran berbagai komoditas terpilih (unggulan). *Kedua*, strategi “forum kemitraan” dalam rangka menggelar dialog partisipatif antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang pengembangan ekonomi. Melalui forum kemitraan, hal-hal yang terkait dengan kegiatan perencanaan, perumusan kebijakan, fasilitasi pelayanan, dan formulasi keputusan dibuat dan didiskusikan.

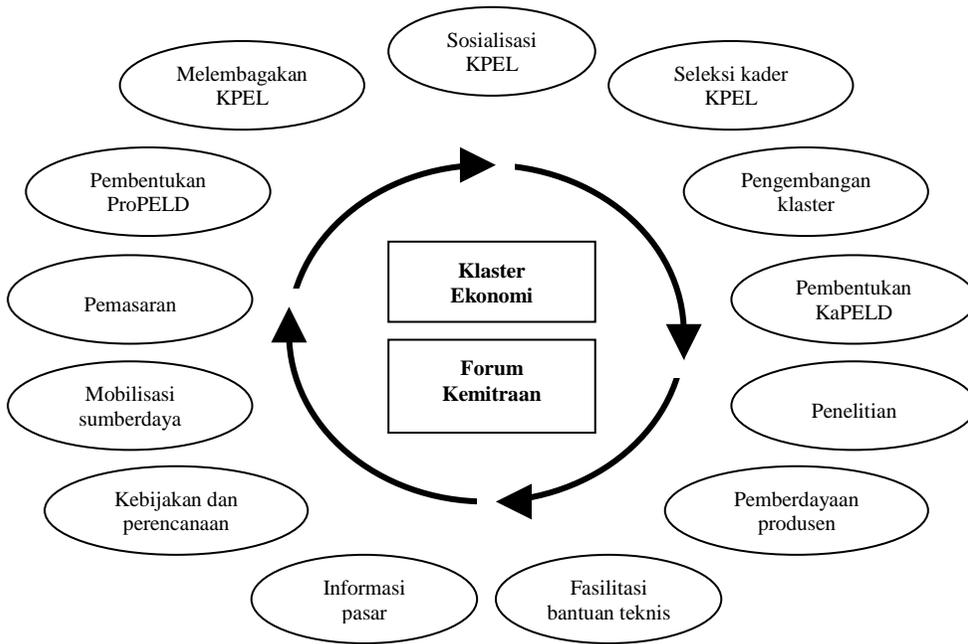
Berdasarkan gambaran di atas, klaster ekonomi dan forum kemitraan merupakan dua kunci pokok dalam KPEL. Konkretnya, KPEL diimplementasikan dalam beberapa langkah dengan tujuan dan target/sasaran kegiatan yang hendak dicapai. Secara garis besar, langkah kegiatan KPEL diawali dari proses sosialisasi, fasilitasi, hingga rekayasa kelembagaan. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran diantara para pemangku kepentingan, mobilisasi sumberdaya dalam wacana kemitraan, hingga pengembangan kelembagaan yang berdayaguna dalam jangka panjang. Sementara itu, target dan sasaran KPEL harus sejalan dengan langkah dan tujuannya yaitu mulai dari timbulnya kesadaran para pemangku kepentingan terhadap eksistensi KPEL, termobilisasinya sumberdaya sesuai dengan kebutuhan, hingga terlembaganya (*institutionalized*) KPEL. Lengkapnya, langkah dan tujuan serta target atau sasaran KPEL dapat diperhatikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Langkah, Tujuan, dan Target/Sasaran Kegiatan Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal

Langkah Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Target/Sasaran Kegiatan
Sosialisasi KPEL	Membangun kesadaran tentang pendekatan dan manfaat KPEL	Timbulnya kesadaran para pemangku kepentingan akan KPEL
Seleksi kader PEL	Menemukan dan melatih kader untuk mamfasilitasi persiapan dan pelaksanaan KPEL	Terpilihnya kader PEL
Pengembangan kluster	Mengidentifikasi dan memilih kluster melalui pengumpulan data dan dalam suatu forum konsultasi	Teridentifikasi dan terpilihnya kluster yang didukung oleh semua pemangku kepentingan
Pembentukan KaPELD (Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal tingkat Kabupaten)	Membentuk kemitraan pemerintah-swasta-produsen-masyarakat pada tingkat kabupaten	Terbangun dan berfungsinya kemitraan
Penelitian	Melakukan studi mengenai pengembangan kluster	Tersedianya data dan informasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan tindakan
Pemberdayaan organisasi produsen	Mengembangkan kapasitas produsen dan organisasinya	Berdayanya para produsen dan organisasinya
Fasilitasi bantuan teknis	Memperbaiki proses dan teknik produksi yang sudah ada	Meningkatnya produktivitas dalam bentuk keterkaitan ke depan dan ke belakang (<i>forward and backward linkages</i>)
Penyebarluasan informasi pasar	Menjamin transparansi dan kesetaraan hubungan usaha	Tersedianya kluster, pemangku kepentingan, dan pasar yang mudah dijangkau (<i>access</i>)
Masukan kebijakan dan perencanaan	Memanfaatkan kemitraan sebagai forum untuk memperoleh masukan dari masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pemerintah
Mobilisasi sumberdaya	Mengadakan atau memfasilitasi mobilisasi sumberdaya bagi kemitraan	Termobilisasinya sumberdaya yang dibutuhkan
Pemasaran	Mengakses pasar melalui identifikasi peluang baru dalam pemasaran, termasuk penggunaan merek secara nasional	Bekembangnya pasar dan kesadaran
Pembentukan ProPELD (Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal tingkat Propinsi)	Membentuk kemitraan pemerintah-swasta-produsen-masyarakat pada tingkat propinsi yang juga mencakup perwakilan KaPELD	Terbentuk dan berfungsinya ProPELD
Melembagakan KPEL	Mengembangkan kelembagaan KPEL untuk keberlanjutan jangka panjang	Terlembaganya KPEL

Sumber : adaptasi dari Alizar *et al.* (2002)

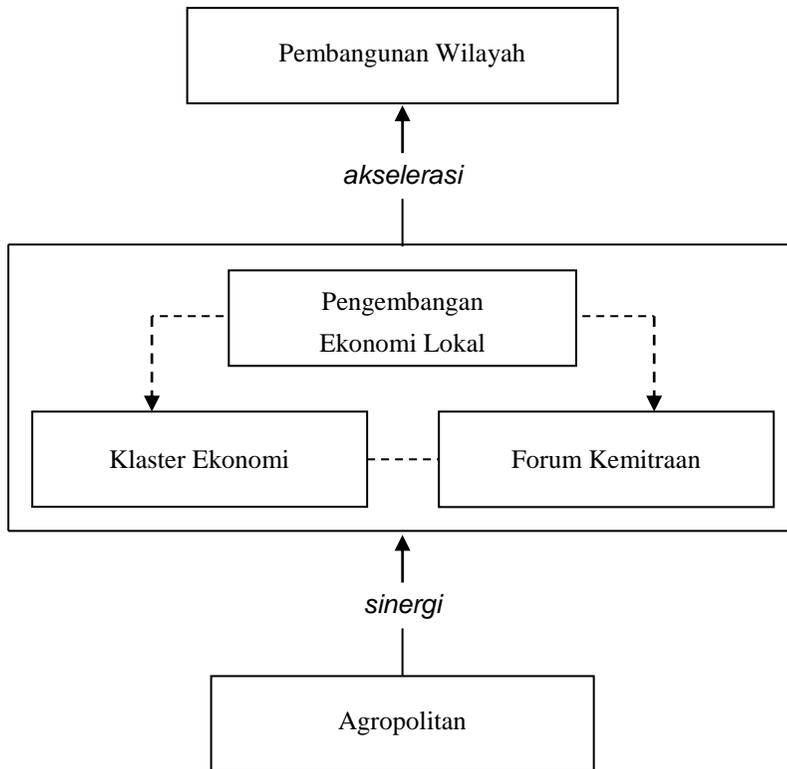
Perlu dicatat bahwa langkah-langkah kegiatan KPEL tidak ditempuh secara linear melainkan bersifat siklus (Gambar 2). Siklus langkah tersebut penting dilakukan dalam rangka evaluasi kegiatan guna mendapatkan koreksian dan masukan bagi perbaikan kluster ekonomi dan forum kemitraan yang dibentuk dan diimplementasikan dalam KPEL.



Gambar 2. Siklus Kegiatan Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal

SINERGI KEBIJAKAN AGROPOLITAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

Sinergi kebijakan agropolitan dan pengembangan ekonomi lokal menunjang percepatan (akselerasi) pembangunan wilayah dapat diilustrasikan sebagaimana tertera pada Gambar 3. Dalam hal ini perlu dibentuk rekayasa kelembagaan yang sejalan dengan dua strategi pokok kebijakan pengembangan ekonomi lokal, yaitu kluster ekonomi dan forum kemitraan.



Gambar 3. Sinergi Kebijakan Agropolitan dan Pengembangan Ekonomi Lokal Menunjang Percepatan Pembangunan Wilayah

Klaster Ekonomi

Klaster merupakan kesatuan hubungan aktivitas khusus antara berbagai perusahaan (*companies*), pemasok (*suppliers*), jasa pelayanan (*service providers*), dan institusi kelembagaan (*associated institutions*) yang terkonsentrasi secara geografis pada suatu wilayah baik regional maupun nasional (Porter, 1990). Oleh karena itu, klaster merupakan elemen penting dalam perumusan kebijakan ekonomi, stabilisasi ekonomi makro, privatisasi, peluang pasar, dan bisnis.

Klaster ekonomi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan kegiatan ekonomi yang ditangani secara tersendiri (Alizar *et al.*, 2002). Dengan kata lain, klaster ekonomi mencakup semua kegiatan mulai dari pra-produksi hingga pasca-produksi, dimana eksistensinya melibatkan semua unit usaha dan pemangku kepentingan serta berbagai lembaga pendukung yang memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Implementasinya, klaster ekonomi paling tidak mengandung tiga unsur, yaitu : (1) kedekatan geografis, mencakup kegiatan lintas komoditas

dan lintas sektoral; (2) kesatuan sektor industri, meliputi kegiatan lintas daerah dan komoditas; dan (3) kesamaan komoditas yang berkaitan dengan kegiatan lintas daerah.

Dalam kluster ekonomi terkandung beberapa prinsip (OECD, 1998). Prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. **Skala ekonomi (*economic scale*)** – berorientasi regional, bukan bersifat pendekatan tunggal terhadap komunitas atau institusi tertentu (*not a single community or jurisdiction*).
2. **Tantangan ekonomi (*economic challenge*)** – menjawab tantangan kebutuhan restrukturisasi ekonomi dalam rangka meningkatkan efektifitas penggunaan masukan (*input*) ekonomi.
3. **Titik tumpu ekonomi (*economic focus*)** – memiliki visi berorientasi pengembangan kelompok kluster regional (*regional cluster portfolio*), bukan hanya semata mengembangkan industri atau perusahaan tertentu.
4. **Kepemimpinan dan proses strategi (*leadership and strategy process*)** – memiliki pimpinan dan organisasi yang peduli terhadap pengembangan ekonomi regional melalui proses pendekatan komprehensif dan kolaboratif terhadap aneka bentuk industri dan institusi.
5. **Kapasitas dalam mengambil tindakan (*capacity to take action*)** – mengambil tindakan secara regional melalui optimalisasi penggunaan sumberdaya teknis dan keuangan dengan tujuan memperoleh manfaat buat kepentingan bersama.

Dalam agropolitan, kluster dapat dikategorikan sebagai hubungan interdependensi antara wilayah inti (*central land*) dan daerah sekitarnya (*hinterland*). Oleh karena itu, kluster yang hendak dibentuk seyogianya sejalan dengan KPEL. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi, pemilihan, analisis, dan pengembangan kluster.

Identifikasi kluster harus merefleksikan potensi-potensi yang berkaitan dengan permintaan pasar, perekonomian, manfaat bagi rumah tangga miskin, dampak berganda bagi perekonomian, dan keberhasilan. Pendekatan yang paling representatif untuk mengetahui potensi-potensi tersebut adalah melalui kegiatan penelitian. Konkretnya, kegiatan penelitian dapat dilakukan dengan cara survey, penilaian lokasi dan komunitas secara cepat (seperti *participatory rural and community appraisal/PARCA*), dan beberapa metode relevan lainnya. Sementara itu, pemilihan kluster didasarkan pada rekomendasi hasil penelitian berikut prinsip indikator demokrasi daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini implementasi otonomi daerah di Indonesia dapat dianggap sebagai wahana yang cukup tepat dalam pemilihan suatu kluster. Secara mendasar, identifikasi dan pemilihan kluster merupakan dua elemen pokok yang harus disiapkan dan diimplementasikan untuk selanjutnya dianalisis dan dikembangkan sesuai kondisi dan perspektif setempat.

Lengkapya, identifikasi dan panduan dalam memilih klaster disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Identifikasi dan Panduan Memilih Klaster

Identifikasi	Panduan
Permintaan pasar	Analisis PDRB (Produk Domestik Regional Bruto); Analisis ketenagakerjaan; Elastisitas harga dan perubahan harga pasar antar waktu; Kontribusi pasokan komoditas; Tingkat produktivitas lahan dan tenaga kerja; dan Keberlanjutan sumber daya dan lingkungan
Perekonomian	Strategi pengembangan; Besaran klaster; Peningkatan nilai tambah; Kompetisi daerah lain; Kapasitas pemerintah daerah setempat; dan Sumberdaya dalam klaster
Keberhasilan	Minat dan dukungan daerah setempat; Dukungan kebijakan; dan Klaster yang cepat menghasilkan
Manfaat bagi rumah tangga miskin	Perolehan pendapatan; Tingkat keterampilan yang diperlukan; Keterlibatan kaum perempuan; Penciptaan lapangan kerja baru; Rataan luas dan status kepemilikan lahan pertanian; dan Persentase lahan yang ditanami komoditas unggulan
Dampak ganda (<i>multiplier effect</i>) bagi perekonomian	Proporsi pendapatan rumah tangga untuk pengeluaran harian; Potensi meningkatkan keterkaitan hulu dan hilir; dan Evaluasi klaster dan identifikasi produk turunan

Sumber : adaptasi dari Alizar *et al.* (2002)

Analisis klaster mengacu pada konsep yang melandasinya (Tabel 3). Konsep dan implementasi analisis klaster meliputi : (1) orientasi pasar dengan fokus pada mekanisme efektifitas penawaran dan permintaan; (2) inklusif dengan cakupan kegiatan fasilitasi lembaga ekonomi terkait; (3) kerjasama dalam solusi permasalahan secara kolaboratif and partisipatif; (4) strategis dalam rangka memotivasi dedikasi kerja para pemangku kepentingan; dan (5) nilai tambah bagi pendapatan lokal. Kelima konsep dan implementasi analisis klaster tersebut merupakan pengejawantahan dari hasil identifikasi dan pemilihan klaster sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan kata lain, analisis klaster dapat dianggap sebagai upaya pemberian “roh” pada klaster agar dapat dikembangkan.

Tabel 3. Konsep dan Implementasi Analisis Klaster

Konsep	Implementasi
Orientasi pasar	Kegiatan difokuskan pada mekanisme efektifitas penawaran dan permintaan
Inklusif	Kegiatan dilaksanakan dalam rangka membantu perusahaan skala besar dan kecil, pemasok (<i>supplier</i>), dan lembaga ekonomi terkait lainnya
Kerjasama	Kegiatan berpijak pada upaya pencarian solusi permasalahan (isu regional) secara kolaboratif dan partisipatif
Strategis	Kegiatan dilakukan guna membantu para pemangku kepentingan dalam menciptakan visi strategis pengembangan motivasi dan dedikasi kerja
Nilai tambah	Kegiatan ditujukan untuk meningkatkan peran serta pemasok (<i>supplier</i>) dan minat pelaku industri perdagangan lainnya dalam upaya meningkatkan pendapatan lokal

Sumber : adaptasi dari OECD (1998)

Setelah analisis klaster, langkah berikutnya adalah pengembangan klaster seperti tertera pada Tabel 4. Langkah-langkah tersebut mencakup : (1) mobilisasi para pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan pengembangan minat dan partisipasi; (2) diagnosis atau penilaian klaster dalam hubungannya dengan ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian; (3) strategi kerjasama dalam bentuk pengorganisasian perusahaan di setiap klaster; dan (5) implementasi berupa pengembangan dedikasi peserta kelompok kerja klaster dan para pemangku kepentingan. Implementasi dari langkah dan proses pengembangan klaster ini dapat diperhatikan pada Tabel 4.

Forum Kemitraan

Dalam konsep pengembangan ekonomi lokal, forum kemitraan mewadahi terjalinnya hubungan tanggungjawab antara pemerintah (aparatur dan wakil rakyat), swasta (perusahaan, lembaga keuangan, pedagang, dan produsen), dan masyarakat (warga komunitas, LSM, dan lembaga pendukung lainnya) dalam suatu forum (Alizar *et al.*, 2002). Dengan kata lain, forum kemitraan dapat didefinisikan sebagai wadah organisasi pemangku kepentingan yang memiliki unsur kesamaan persepsi, jalinan komitmen, keputusan kolektif, dan sinergi aktivitas.

Mengingat beragamnya pemangku kepentingan, maka hal paling mendasar yang perlu dilakukan dalam forum kemitraan adalah penilaian (*assessment*) terhadap eksistensi dan aspirasi pemangku kepentingan. Metode yang cukup representatif dalam penilaian terhadap eksistensi dan aspirasi pemangku kepentingan tersebut adalah analisis pemangku kepentingan (*stakeholder analysis*).

Tabel 4. Langkah, Proses, dan Implementasi Pengembangan Kluster

Langkah	Proses	Implementasi
Mobilisasi	Inisiasi pengembangan minat dan partisipasi para pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan kebutuhan mereka	Mengembangkan kolaborasi antar pemangku kepentingan; Memobilisasi kegiatan secara terorganisir; Meningkatkan partisipasi sektor publik dan swasta; dan Mengembangkan eksistensi pemangku kepentingan
Diagnosis	Penilaian kluster dalam hubungannya dengan ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian yang dapat membantu pengembangan kluster	Menganalisis kluster secara independen; Mengidentifikasi kluster regional; Menentukan posisi kluster dan infrastruktur ekonomi regional; dan Melakukan karakterisasi peluang dan tantangan
Strategi kerjasama	Pengorganisasian perusahaan di setiap kluster (<i>demand-side</i>) dan sektor publik/swasta (<i>supply-side</i>) guna menentukan prioritas, mencari jalan keluar permasalahan, dan melakukan inisiatif kegiatan dalam wadah kerjasama kelompok	Memelihara hubungan pelaku usaha dengan lembaga-lembaga strategis; Mendirikan kelompok kerja berorientasi pasar; Memilih pimpinan kelompok kerja yang berdedikasi dan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemangku kepentingan; Menciptakan mekanisme pertanggungjawaban dalam setiap proses pengembangan kegiatan; Mengembangkan rencana kegiatan dengan fokus reformasi rancang bangun jasa pelayanan yang memiliki nilai tambah dan inovasi pasar; Menata pasar (<i>market viability</i>); dan Mendukung kebutuhan pemangku kepentingan dalam setiap implementasi kegiatan
Implementasi	Pengembangan dedikasi peserta kelompok kerja kluster dan para pemangku kepentingan dalam pengambilan tindakan dan penentuan atau penciptaan organisasi kerja untuk keberlanjutan kegiatan	Mengelaborasi kerangka fikir (<i>framework</i>) kluster; Memanfaatkan sumberdaya dana sesuai tipe dan skala kegiatan; Mempertahankan sumberdaya kepemimpinan secara berkelanjutan; dan Menciptakan dan mengembangkan kegiatan monitoring dan evaluasi

Sumber : adaptasi dari OECD (1998)

Race dan Millar (2006) menekankan bahwa paling tidak ada tiga elemen penting dalam analisis pemangku kepentingan yang perlu mendapatkan perhatian. Ketiga elemen tersebut adalah : (1) pemangku kepentingan itu sendiri yaitu baik perorangan maupun kelompok; (2) partisipasi (keterlibatan); dan (3) keterkaitan (*engagement*) sebagai bentuk dari partisipasi yang tidak hanya bernuansa

konsultasi semata. Oleh karena itu, dalam analisis pemangku kepentingan perlu dipahami alur lingkaran operasionalisasi kegiatan (dalam hal ini forum kemitraan) mengingat eksistensi lembaga ini memiliki dimensi sosial kemasyarakatan yang cukup majemuk dan dinamis.

Implementasi analisis pemangku kepentingan dilandasi empat aspek pokok, yakni identifikasi, pemahaman persepsi, penyediaan informasi, pelatihan, serta monitoring dan evaluasi. Neef (2005) menggarisbawahi bahwa identifikasi pemangku kepentingan perlu dilakukan dalam rangka menghindari metode diagnostik jangka pendek, mematuhi kode etik pekerjaan, dan membuat keseimbangan minat dan perhatian antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang lebih realistis, diperlukan penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif secara partisipatif. Hasil identifikasi memuat tanggungjawab, keragaan, dan indikator risiko dalam kaitannya dengan peran dan tugas pemangku kepentingan. Peran dan tugas tersebut diimplementasikan dalam wacana kegiatan kelompok (forum kemitraan), bukan berbasis individu. Hal demikian penting dalam rangka menghindari variasi heterogenitas antar pemangku kepentingan.

Persepsi pemangku kepentingan perlu diketahui dalam kaitannya dengan integrasi peran dan tugas, mengingat persepsi pemangku kepentingan berbeda antara satu dengan lainnya baik individu maupun kelompok. Feldman (1996) menggarisbawahi bahwa persepsi tersebut dapat berupa pandangan terhadap kebijakan, program, kegiatan, dan upaya promosi yang dilakukan pihak eksternal. Oleh karena itu, dengan diketahuinya persepsi pemangku kepentingan mulai dari dimana mereka, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka miliki, hingga apa yang mereka inginkan, merupakan elemen-elemen penting untuk memotivasi komitmen mereka dalam akselerasi kegiatan forum kemitraan. Dengan kata lain, ini adalah proses dalam rangka integrasi tugas dan peran pemangku kepentingan dalam suatu aksi kolektif (Grieco, 1990 dan Gabriel, 2002).

Penyediaan informasi seyogianya berbasis kebutuhan (*needs*). Dengan kata lain, sebagaimana dikemukakan Ballit *et al.* (1997), penyediaan informasi lebih bersifat permintaan (*demand-driven*) dibandingkan penawaran (*supply-driven*). Disamping itu, selain penyediaan informasi, unsur lainnya yang perlu diperhatikan adalah pelatihan (*training*). Melalui pelatihan, pemangku kepentingan difasilitasi dengan pengetahuan berupa kerangka dasar dalam menciptakan dan sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap eksistensi forum kemitraan. Pelatihan bisa meliputi aspek kepemimpinan, pengambilan keputusan, teknis ketatalaksanaan, pengembangan inovasi, aksesibilitas terhadap sumberdaya, dan aspek sosial ekonomi lain yang pada gilirannya diharapkan dapat menghasilkan dampak ganda (*multiplier effect*) melalui determinasi spesifik lokasi (Aggrawal, 2002).

Monitoring dan evaluasi merupakan aspek krusial dalam melihat perkembangan kegiatan dan bahan masukan untuk umpan balik perbaikan dan penyempurnaan forum kemitraan. Menurut Gonsalves *et al.* (2005), monitoring dan evaluasi semestinya berlandaskan prinsip partisipatif (*participatory monitoring and evaluation*). Implementasinya, kriteria dan indikator kegiatan

dirancang secara kolektif oleh semua pemangku kepentingan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan relevansi atau kesesuaian (Vernooy, 2005).

Sinergi Kebijakan Agropolitan dan Pengembangan Ekonomi Lokal

Secara teoritis, sinergi kebijakan agropolitan dan pengembangan ekonomi lokal akan terwujud apabila identifikasi dan analisis klaster ekonomi serta pembentukan forum kemitraan berjalan sesuai dengan prosedur sebagaimana telah diuraikan di atas. Akan tetapi, implementasinya memerlukan kesamaan persepsi dan jalinan komitmen berikut konsolidasi dalam bentuk kolektifitas perencanaan dan keputusan partisipatif antar para pemangku kepentingan. Untuk itu, perlu disusun langkah strategi (*road map strategy*) guna menjembatani dan sekaligus merealisasikan sinergi kebijakan tersebut.

Paling tidak ada tiga langkah strategi kebijakan yang perlu diupayakan dalam mewujudkan implementasi sinergi agropolitan dan pengembangan ekonomi lokal. Ketiga langkah strategi tersebut adalah sosialisasi, konsolidasi, dan uji coba.

Sosialisasi penting dilakukan dalam rangka mengenalkan sinergi agropolitan dan pengembangan ekonomi lokal kepada masyarakat, terutama bagi kalangan para pemangku kepentingan. Konkretnya sosialisasi dilaksanakan melalui forum-forum pertemuan atau dengan memanfaatkan media komunikasi teknologi informasi.

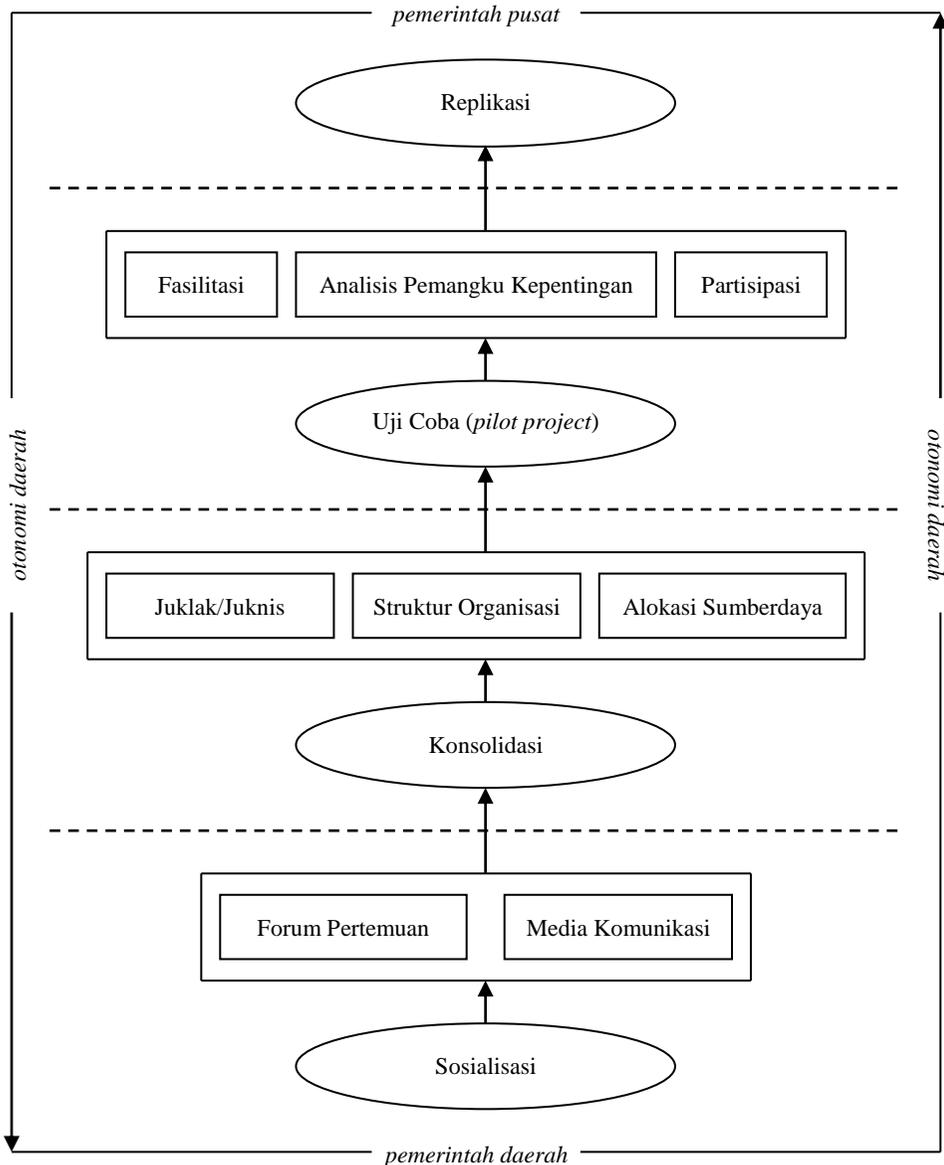
Konsolidasi dapat dianggap sebagai tindak lanjut kegiatan yang mekanisme pelaksanaannya identik dengan sosialisasi. Konsolidasi ditujukan untuk penyamaan persepsi, urun rembuk pekerjaan, dan pendelegasian tanggungjawab antar para pemangku kepentingan. Melalui konsolidasi diharapkan terbentuk beberapa komponen penting seperti struktur organisasi, petunjuk teknis dan pelaksanaan (juklak/juknis), dan alokasi sumberdaya.

Uji coba ditujukan guna mendapatkan umpan balik dan sekaligus penyempurnaan kegiatan. Implementasinya, keluaran (*output*) konsolidasi diadaptasikan guna mendapatkan masukan (*input*) untuk bahan revisi. Meskipun secara semantik uji coba dapat diartikan sebagai proyek percontohan (*pilot project*), namun dalam pelaksanaannya istilah “pilot proyek” seyogianya dihindari agar kesan yang selama ini melekat dalam kata-kata “proyek” tidak dikonotasikan sebagai sesuatu yang hanya berlangsung selama kegiatan berjalan. Dengan demikian, istilah pengganti yang dianggap sesuai untuk itu adalah langkah awal (*initial phase*) kegiatan.

Kunci utama dari uji coba adalah pengenalan dan fasilitasi pendampingan serta partisipasi dari segenap pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sekaligus didalamnya dilaksanakan analisis pemangku kepentingan (*stakeholder analysis*) secara iteratif diiringi pemantauan dan pengawasan yang bersifat partisipatif (*participatory monitoring and evaluation*).

Idealnya ketiga langkah strategi di atas diimplementasikan dalam kerangka otonomi daerah dengan fasilitasi pemerintah pusat dan dukungan pihak swasta

serta lembaga kompeten terkait lainnya (Gambar 4). Lokasi uji coba kegiatan seyogianya berada di wilayah eksistensi agropolitan. Keberhasilan uji coba sinergi kebijakan agropolitan dan pengembangan ekonomi lokal merupakan bagian integral dari kesuksesan pembangunan wilayah yang selanjutnya dapat direplikasikan secara selektif pada wilayah-wilayah lainnya.



Gambar 4. Langkah Strategi (Road Map Strategy) Sinergi Kebijakan Agropolitan dan Pengembangan Ekonomi Lokal

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Sinergi agropolitan dan pengembangan ekonomi lokal dapat dianggap sebagai salah satu kebijakan strategis menunjang percepatan pembangunan wilayah, termasuk di dalamnya pembangunan pertanian. Implementasi sinergi tersebut dapat ditempuh melalui rekayasa kelembagaan klaster ekonomi dan forum kemitraan.

Klaster ekonomi dibentuk melalui proses identifikasi, pemilihan, analisis, dan pengembangan sesuai tujuan dan kebutuhan. Sementara itu, forum kemitraan merupakan wadah organisasi dalam rangka memudahkan proses interaksi dan integrasi antar pemangku kepentingan berlandaskan prinsip kesamaan persepsi, jalinan komitmen, keputusan kolektif, dan sinergi aktivitas. Hal mendasar yang perlu dilakukan dalam sinergi kebijakan agropolitan dan pengembangan ekonomi lokal adalah penyusunan langkah strategi (*road map strategy*), fasilitasi, partisipasi, serta monitoring dan evaluasi kegiatan.

Agar sinergi kebijakan agropolitan dan pengembangan ekonomi lokal dapat berjalan secara efektif dan efisien, implementasinya diupayakan bertumpu pada prinsip demokrasi daerah setempat (*locally democratic principle*). Sejalan dengan penerapan otonomi daerah, sinergi kebijakan tersebut seyogianya diatur oleh masing-masing pemerintah daerah. Langkah operasionalnya dapat ditempuh melalui rancangan dan implementasi kebijakan peraturan daerah (Perda) yang disosialisasikan dan mendapat dukungan dari semua pihak khususnya para pemangku kepentingan terkait. Sementara itu, fungsi dan peran pemerintah pusat lebih bersifat sebagai koordinator dan fasilitator dalam rangka memacu pembangunan wilayah dan selanjutnya direplikasikan antar wilayah dalam kerangka pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggrawal, J. 2002. *Training Method for Community Development in India. Country Paper in the Asian Productivity Organization Seminar. Held in the Republic of Korea. August 26-August 1, 1998. Edited by Cruz, D.A. Asian Productivity Organization. Tokyo.*
- Alizar, A., A. Tarigan, A. Bakti, A. Setiawan, E. Syarief, E. Laksono, G. Lele, H. Rahma, I. Suparman, J. Boule, Susanto, dan W. Yuliastanti. 2002. *Tigabelas Langkah Kemitraan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL). Sekretariat KPEL, Bappenas, UNDP, dan UN HABITAT. Jakarta.*
- Blakely, E.J. 1991. *The Meaning of Local Economic Development in Local Economic Development : Strategies for a Changing Economy (Editor : R. Scott Fosler). International City Management Association (ICMA). Washington D.C.*

- Blakely, E.J. 1994. *Planning Local Economic Development : Theory and Practice*. Cetakan Kedua. Sage Publication. U.S.A.
- Deptan. 2002. Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Pedoman Program Rintisan Kawasan Agropolitan. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta.
- Deptan. 2003. Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan : Menuju Kesejahteraan Melalui Sinergi Kegiatan yang Terkoordinasi. Sekretariat Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta.
- Feldman, R.S. 1996. *Understanding Psychology*. McGraw Hill. Boston.
- Friedman, J. dan C. Weaver. 1999. *Territory and Function : the Evolution of Regional Planning*. Edward Arnold (Publishers) Ltd. London.
- Friedman, J. dan Douglas, M. 1975. Pengembangan Agropolitan : Menuju Siasat Baru Perencanaan Regional di Asia (terjemahan dari *Agropolitan Development : Towards a New Strategy for Regional Planning in Asia*). Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Gabriel., R.L. 2002. *Farmer Field School : A Second Look Theoretical Application of Social Psychology in Rural Development. Professorial Chair Lecture Delivered at the Institute of Community Education, College of Public Affair, UPLB*. Philippine.
- Grieco, M. 1990. *Development in the Developed World : Revealing and the Hidden Agenda in Rural Development : Problems and Practices* (Editors : H. Buller and Wright, S.). Athenaeum Press Ltd. Great Britain.
- Hansen, N. 1981. *Development from Below : the Center-Down in Development Paradigm Development from Above or Below* (Editors : W.B. Stohr and D.R.F. Taylor). John Wiley and Sons. New York.
- Nasution, L.I. 1998. Pendekatan Agropolitan Dalam Rangka Penerapan Pembangunan Wilayah Perdesaan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Neef, A. 2005. *Identifying Local Stakeholders' Research Priorities : Metodological Challenges. Participatory Research and Development for Sustainable Agricultural and Natural Resource Management : A Resource Book* (Editors : Gonsalves, J., et al). International Potato Center-Users Perspective with Agricultural Research and Development (CIP-UPWARD). Philippines.
- OECD. 1998. *Cluster Analysis and Cluster-Based Policy in OECD Countries : Various Approaches, Early Results, and Policy Implications. Organization for Economic Co-operation and Development*. France.
- Porter, M. 1990. *The Competitive Advantage of Nations*. Basingstoke, Macmillan, U.S.A.
- Race, D. dan J. Millar. 2006. *Training Manual : Social and Community Dimensions of ACIAR Projects. Australian Center for International Agricultural Research – Institut for Land, Water, and Society of Charles Sturt Unverisity*. Australia.

- Rusastra, I.W., Hendiarto, K.M. Noekman, A. Supriatna, W.K. Sejati, dan D. Hidayat. 2004. Kinerja dan Perspektif Pengembangan Model Agropolitan dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Wilayah Berbasis Agribisnis. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian dan Proyek Pengkajian Teknologi Pertanian Partisipatif (*Participatory Assessment of Agricultural Technology Project/PAATP*). Bogor.
- Rusastra, I.W., P. Simatupang, dan B. Rachman. 2002. Pembangunan Ekonomi Perdesaan Berbasis Agribisnis. Analisis Kebijakan : Pembangunan Pertanian Andalan Berwawasan Agribisnis. Monograph Series No. 23. Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Stohr, W.B. 1981. *Development from Below in Development from Above or Below* (Editors : W.B. Stohr and D.R.F. Taylor). *John Wiley and Sons*. New York.
- Suwandi. 2005. Agropolitan : Merentas Jalan Meniti Harapan. PT Duta Karya Swasta. Jakarta.
- Vernooy, R. 2005. *Monitoring and Evaluating Participatory Research and Development : Some Key Elements. Participatory Research and Development for Sustainable Agricultural and Natural Resource Management : A Resource Book* (Editors : Gonsalves, J. et al.). *International Potato Center-Users Perspective with Agricultural Research and Development (CIP-UPWARD)*. Philippines.